

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kinerja singkatan dari kinetika energi kerja, yang padanan dalam bahasa Inggris yaitu *performance*. Kinerja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, dan kemampuan kerja tentang peralatan. Adapun pengertian kinerja berasal dari kata *performance* yang berarti hasil pekerjaan atau prestasi kerja pegawai, hasil kerja ini yang menentukan keberhasilan tujuan organisasi (Wibowo, 2016). Maka dari menurut Wibowo dapat dijelaskan bahwa, kinerja merupakan bagian yang sangat penting dan mempengaruhi keberhasilan dalam kemajuan suatu organisasi/instansi, yang dimana pegawai sebagai penentu dalam menghasilkan kinerja suatu organisasi/instansi. Kinerja dapat menggambarkan mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dan tujuan.

Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan/pegawai sesuai dengan tugas, fungsi dan perannya dalam instansi. Kinerja karyawan/pegawai merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya instansi untuk mencapai tujuannya. Hal ini diperkuat dengan adanya teori yang menjelaskan tingkat kinerja pegawai sangat tergantung kedua faktor yaitu kemampuan pegawai itu sendiri, seperti tingkat pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dimana dengan tingkat kemampuan yang semakin tinggi akan mempunyai kinerja semakin tinggi pula

(Robbins, 1996). Kinerja menjadi suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan, dan sepatutnya seseorang memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan dari seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya, sehingga hasil dari kerjanya berkualitas dan sesuai dengan akurasi harapan suatu instansi.

Adapun dalam kinerja tentu dari sumber daya manusia nya yang mempengaruhi kualitas kinerja. Sumber daya manusia merupakan aset yang berperan dalam menjalankan kegiatan dari suatu instansi, tentunya merupakan pelaku aktif dalam memberi pengaruh dan penentu tercapainya suatu kinerja yang berkualitas. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat sentral dalam instansi, apapun bentuk dan tujuannya, pentingnya sumber daya manusia dalam suatu instansi, tentu dibutuhkannya yang memiliki kemampuan dalam menghasilkan kinerja berkualitas dan produktif. Didukung pula oleh teori ahli tentang kemampuan sumber daya manusia, bahwa sumber daya manusia sebagai kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu. Kemampuan keseluruhan seseorang pada hakikatnya terdiri dari dua faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Dalam pekerjaan terkait kegiatan administrasi pada suatu organisasi, kemampuan intelektual tentu lebih dominan. Kemampuan intelektual seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan tertentu bersumber dari latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimilikinya (Robbins, 2006).

Setiap instansi dalam melakukan aktivitasnya pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai, dan untuk mencapai atau mewujudkan tujuan tersebut dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia. Atas tersedianya tenaga kerja yang tetap untuk menempati jabatan serta waktu yang tepat dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran yang ditetapkan. Sehingga faktor sumber daya manusia dalam pelaksanaan kerja tidak boleh diabaikan. Hal tersebut terlihat dari semakin kecilnya permintaan untuk memperhatikan aspek manusia bukan hanya terfokus pada aspek teknologi dan ekonomi. Untuk mencapai tujuan perusahaan tentunya diperlukan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja yang berkualitas dan sesuai dengan bidangnya saat ini.

Sumber daya manusia dan kinerja memiliki keterhubungan, karena didalam suatu instansi tentunya memiliki tenaga kerja sebagai jalan guna mencapai tujuan suatu instansi. Untuk mencapai suatu tujuan instansi, kinerja sumber daya manusia harus jadi prioritas. Karena jika kinerja tanpa sumber daya manusia yang baik suatu instansi akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan.

Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, maka dengan adanya kementerian, hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab dalam membantu tugas kepresidenan, yang dimana salah satunya adalah Kementerian Agama. Kementerian Agama sebagai sub sistem instansi pemerintahan Republik Indonesia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah dibidang agama, yang dimana tugas dan fungsi Kementerian agama ada pada Peraturan Menteri Agama

Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. Disinilah hadirnya peran Kementerian Agama Kota Palangka Raya merupakan salah satu instansi pemerintah di Kota Palangka Raya yang mempunyai tugas membantu Walikota Palangka Raya dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dibidang keagamaan.

Melihat dinamika dari sisi agama pada Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, yang dimana kehidupan beragama dan kerukunan umat beragama di Kota Palangka Raya sangat kondusif, dimana kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh umat beragama, organisasi/lembaga keagamaan/lembaga pendidikan agama dapat dilakukan dan berjalan dengan baik, termasuk dalam pelaksanaan kehidupan beragama dan pendirian rumah ibadah, dakwah agama, pelaksanaan MTQ/STQ, Pesparawi, Festival Tandak dan peringatan hari besar keagamaan, selalu mendapat dukungan pemerintah daerah Kota Palangka Raya.

Menurut sumber data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya yang termuat dalam website Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, data jumlah penduduk menurut agama/aliran kepercayaan dan jenis kelamin di Kota Palangka Raya pada tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Agama/Aliran Kepercayaan dan Jenis Kelamin di Kota Palangka Raya Tahun 2022

Agama dan Aliran Kepercayaan	Jumlah Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Islam	107.080	102.122	209.202
Protestan	38.158	38.692	76.850
Katolik	3.088	2.813	5.901
Hindu	1.830	1.759	3.589
Budha	260	226	486
Konghucu	5	5	10
Aliran Kepercayaan	15	14	29
Total	150.436	145.631	296.067

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya

Dari sekilas data diatas menunjukkan bahwa pembinaan dan pelayanan keagamaan di Kota Palangka Raya memerlukan strategi program yang harus dapat menyentuh persoalan kemasyarakatan secara keseluruhan, terlebih kondisi Kota Palangka Raya masih memerlukan pembangunan dan penataan lebih lanjut.

Dalam konsep tri kerukunan umat beragama merupakan konsep yang digulirkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat antar umat beragama yang rukun di Indonesia. Perbedaan keyakinan dan kepercayaan sangat rentan mengacu pada konflik antar agama, apalagi adanya pihak yang memprovokasi untuk mengusik ketenangan masyarakat yang sudah rukun. Dengan adanya gesekan-gesekan yang akan memecah belah rasa persatuan berbangsa, maka pemerintah telah berupaya mengeluarkan kebijakankebijakan guna mengantisipasi timbulnya perselisihan umat beragama di Indonesia. Tri kerukunan beragama bertujuan untuk menciptakan rasa kebersamaan ditengah perbedaan suku, etnis, budaya dan agama guna menjunjung hak-hak manusia dalam menjalankan kewajibannya pada suatu agama yang mereka yakini. Tri kerukunan beragama mencakup

pada kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.

Pada tahun 2024 nantinya masyarakat Indonesia akan melaksanakan pemilu yang merupakan momen penting dalam sistem politik demokrasi di Indonesia. Melalui proses pemilu, rakyat memiliki hak suara untuk memilih wakil-wakilnya yang akan mewakili kepentingan dan aspirasi mereka di lembaga legislatif dan eksekutif. Kontestasi pemilu 2024 nanti dikhawatirkan akan ada dinamika terhadap isu tentang agama yang mencuat, dan tentu hal ini bisa saja merambat pada masyarakat Kota Palangka Raya dan mengganggu kerukunan umat beragama. Dalam benak peneliti, hal tersebut menjadi tugas instansi Kementerian Agama Kota Palangka Raya yang hendaknya mampu memberikan wujud binaan agar terjaganya kerukunan masyarakat beragama pada Kota Palangka Raya.

Berkaitan erat dari sisi kinerja suatu instansi dan sisi bidang yang dinaungi yaitu agama maka hal ini yang menjadi urgensi dalam penelitian ini ialah perlu kita mengetahui, mengkaji, dan memahami bagaimana kinerja pada Kementerian Agama Kota Palangka Raya dalam menjaga kerukunan umat beragama dimasa jelang pemilu tahun 2024. Karena khususnya pada Kota Palangka Raya, informasi yang berkaitan tentang kinerja pada instansi Kementerian Agama Kota Palangka Raya minim diketahui oleh sebagian besar masyarakat. Hal ini dirasa penting dan nantinya membuahkan hal positif bagi masyarakat Kota Palangka Raya untuk bisa mengetahui sejauh mana kinerja dari Kementerian Agama Kota Palangka Raya, apalagi jelang kontestasi

pemilu di tahun 2024 nantinya. Maka peneliti hendak mengetahui dalam aspek menjaga kerukunan umat bergama dari kinerja Kementerian Agama Kota Palangka Raya. Dengan peneliti mengkaji bagaimana kinerja dan apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung yang mempengaruhinya, tentu hal tersebut dapat membuka jendela pengetahuan lebih leluasa mengenai kinerja pada Kementerian Agama Kota Palangka Raya dalam menjaga kerukunan umat beragama jelang pemilu Tahun 2024.

Dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kinerja Kementerian Agama Kota Palangka Raya Dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama Jelang Pemilu Tahun 2024”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja Kementerian Agama Kota Palangka Raya dalam menjaga kerukunan umat beragama jelang pemilu tahun 2024?
2. Apa faktor penghambat dan faktor pendukung yang mempengaruhi kinerja Kementerian Agama Kota Palangka Raya dalam menjaga kerukunan umat beragama jelang pemilu tahun 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk Mengetahui dan menjelaskan kinerja Kementerian Agama Kota Palangka Raya dalam menjaga kerukunan umat beragama jelang pemilu tahun 2024.
2. Untuk Mengetahui dan menjelaskan faktor penghambat dan faktor pendukung yang mempengaruhi kinerja Kementerian Agama Kota Palangka Raya dalam menjaga kerukunan umat beragama jelang pemilu tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Peneliti menjabarkan bagaimana kinerja dan apa faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhinya, sehingga penelitian ini dapat dipahami dan membentuk hasil yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan menjadi referensi penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini digunakan sebagai syarat dalam menyelesaikan tugas akhir dan untuk memperoleh gelar sarjana jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya. Dan juga manfaat dari penelitian ini menjadi bahan pengembangan akademik dalam proses pembelajaran di kampus FISIP UPR.